RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, 01 Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

SALDI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19730306 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2021 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Dan Fungsi BKPSDM 15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM 17
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM
4.1. Program dan Kegiatan 20
BAB. V PENUTUP 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Penyusunan Rancangan RKPD mencakup Penelahaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit Perangkat Daerah adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelengaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah, dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efesien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian, pelatihan dan pendidikan

sumber daya aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Derah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2023

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) sampai dengan Tahun 2023, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan target kinerja capaian program, Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pada Tahun 2023 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 1 Program yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel evaluasi dibawah ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2023
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2022	
					Target Renja BKPSDM tahun 2023	Realisasi Renja BKPSDM s/d Triwulan IV Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	66	61	62	70,1	113,06	15	146,1	221,4
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	81	82					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKj, LKPJ, LPPK, LPPD dan Evaluasi Kinerja	90	30	15	15	0,00	15	45	50
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	20	0	5	5	0,00	5	5	25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA	90	18	18	18	0,00	18	36	40,0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	72	24	12	12	75	12	45	62,5

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	108	36	18	18	0	18	54	50,0
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium ASN yang tersedia	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48		12	12	75	12	21	43,8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	549	133	140	140	100	68	341	62,1
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230	46	47	47	100	46	139	60,4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Penerangan Kantor	924	284	160	160	0	160	444	48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersedia	72	24	12	12	75	12	45	62,5

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Layanan Surat Menyurat	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor	72	24	12	12	75	12	45	62,5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	12	4	2	2	0	2	6	50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan/ Operasional	120	40	20	20	0	20	60	50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	204	68	34	**34**	0	71	48,9	64
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**Indeks Profesionalitas ASN (%)**	**77**	50,9	71		**0**	**9,2%**	**9,1**	**76**
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	**12**	10,3	9,2	13,1	127,2	**8,4%**	10,5	**86**
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal (%)	**12,2**	16,9	8,4	30,9	204,8	**92%**	87,5	**94**
		Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi (%)	**93**	87,1	92	85,9	94,9	**56,3%**	71,8	118
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu (%)	**61**	69	56,3	78,4	131,4	**25%**	40	**80**
		Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (%)	**50**	-12,5	25	11				

	Pengembangan Kompetensi ASN									
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12	4	2	2	100	2	8	66,7
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2187	169	10	5	50	200	374	17,1
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	198	148	32	78	200	40	252	127,3
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	435	-	77	108	81	100	162	37,2
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300	0	76	513	364,5	75	352	117
	Mutasi dan Promosi ASN									
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	108	51	8	247	2825	20	297	275
	Pengelolaan Mutasi AS	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20	-	5	59	880	5	49	245
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Orang)	2500	802	500	661	132,2	500	1963	79
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin (Kasus)	16	14	3	8	233,3	2	23	143,8
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian yang di Proses (Berkas)	52	13	12	4	33,3	10	27	51,9

	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah Berkas Karis/ Karsu/ Karpeg/ Kartu ASN serta Pelayanan Pensiun PNS (Berkas)	1250	485	250	446	178,4	250	1181	94,5
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data/ Informasi Aparatur yang Valid dan Up to date (Dokumen)	30	10	5	5	0	5	15	50
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	36		9	9	55,6	9	14	38,9
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	623		148	163	70,9	178	283	45,4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa capaian kinerja yang dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan. Hal ini tergambar dalam table 2.2 pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2025	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2025	2025	2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12%		7,3%	8,2%	9,2%	10,3%	8,2%	10,3%	13,1%		8,2%	9,2%	
2.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	12,2%		5,9%	7,1%	8,4%	9,7%	9,6%	16,9%	30,9%		7,1%	8,4%	
3.	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi	93%		92%	92%	92%	92%	87,1%	87,3%	85,9%		92%	92%	
4.	Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	61%		53,9%	55,9%	56,3%	56,7%	60,8%	69%	78,4%		55,9%	56,3%	
5.	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	50%		25%	25%	25%	25%	37,5%	-50%	11%		25%	25%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pelaksana teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu - isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut:

a. Optimalisaisi manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalisme ASN
b. Pendayagunaan aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional belum sesuai dengan yang diharapkan
c. Motivasi ASN untuk mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya belum terwujud
d. Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian belum secara maksimal dilaksanakan
e. Penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur
f. Tingkat disiplin Aparatur yang masih rendah dan belum memahami tentang tugas dan fungsinya sebagai aparatur

Isu-isu penting diatas mengisyaratkan perlunya meletakkan peningkatan pembinaan dan pengembangan PNS menjadi program prioritas dalam menyiapkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi perubahan di era reformasi birokrasi ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Review terhadap Rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Srategis Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil musyawarah dari beberapa tingkatan mulai dari desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang menjadi acuan suatu program atau kegiatan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan menata pemerintah yang bersih dan professional dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi rasa aman, tentram dan sejahtera, maka dari itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada semua kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan dalam rangka menata manajemen kepegawaian pada pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai human capital yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pemerintah dibidang E-Government dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan pemanfaatan system informasi berbasis aplikasi, sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam mengelola administrasi kepegawaian di Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan organisasi adalah

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program

operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

NO.	TUJUAN
1	Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil dan memperhitungkan waktu. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN.
2	Meningkatnya Penataan ASN.
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif	Meningkatnya profesionalisme aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	65	68	71	73	75	77
		Meningkatnya penataan ASN	Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi	92%	92%	92%	92%	93%	93%
			Rasio pejabat fungsional tertentu	53,9%	55,9%	56,3%	56,7%	56,9 %	61%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	81	82	82	83	83	83

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 mempunyai 2 (Dua) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Kepegawaian Daerah

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan yaitu:

1. **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK

9. Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN

- Pengelolaan Promosi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

10. Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Administasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pembinaan Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Pengeloaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Adapun rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 antara lain:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Nilai SAKIP OPD** **Indeks Kepuasan Masyarakat**	**BKPSDM**	**100%**	**23.202.094.881**	**APBD**		**100%**	**26.682.409.113**
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja**	**BKPSDM**	**100%**	**41.272.000**	**APBD**		**100%**	**47.462.800**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	18 Dok	34.804.000	APBD		18 Dokumen	40.024.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	15 Laporan	4.468.000	APBD		15 Laporan	5.138.200
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Laporan	2.000.000	APBD		5 Laporan	2.300.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Kelengkapan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**BKPSDM**	**100%**	**21.622.823.081**	**APBD**		**100%**	**24.866.246.543**

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	18 Laporan	30.390.000	APBD		12 Bulan	34.948.500
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	1 Dokumen	165.743.200	APBD		1 Laporan	190.604.680
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	50 Orang	21.426.689.881	APBD		50 Orang	24.640.693.363
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BKPSDM**	**100%**	**135.578.000**	**APBD**		**100%**	**155.914.700**
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	68 Paket	75.850.000	APBD		68 Paket	87.227.500
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	46 Orang	59.728.000	APBD		46 Kali	68.687.200
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**			**1.190.000**				**1.368.500**
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	12 Laporan	1.190.000	APBD		12 Bulan	1.368.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKPSDM**	**100%**	**783.873.800**			**100%**	**901.454.870**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	160 Paket	8.419.000	APBD		160 Paket	9.681.850
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3020 Paket	68.457.000	APBD		3020 Paket	78.725.550
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1000 Paket	12.300.000	APBD		1000 Paket	14.145.000
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	68050 Paket	55.072.800	APBD		68050 Paket	63.333.720

16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM	1 Dokumen	16.500.000	APBD		1 Dokumen	18.975.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	1 Laporan	623.125.000	APBD		82 Paket	716.593.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM**	**100%**	**289.608.000**	**APBD**		**100%**	**333.049.200**
18	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	1 Laporan	9.200.000	APBD		1 Laporan	10.580.000
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	81.150.000	APBD		1 Laporan	93.322.500
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	199.258.000	APBD		1 Laporan	229.146.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM**	**100%**	**327.750.000**			**100%**	**376.912.500**
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	20 Unit	233.580.000	APBD		20 Unit	268.617.000
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	34 Unit	24.650.000	APBD		34 Unit	28.347.500
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM	2 Unit	69.520.000	APBD		2 Unit	79.948.000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**Indeks Profesionalitas ASN**	**BKPSDM**	**75**	**2.133.630.600**		**77**	**100%**	**2.453.675.190**
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	**BKPSDM**	**11,6%**			**12%**		

			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	**BKPSDM**	**11,2%**			**12,2%**		
			Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi	**BKPSDM**	**93%**			**93%**		
			Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	**BKPSDM**	**56,9%**			**61%**		
			Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	**BKPSDM**	**25%**			**50%**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**Jumlah Bezzeting/ Formasi yang diusulkan**	**BKPSDM**	**500 Formasi**	**185.900.000**	**APBD**		**500 Formasi**	**213.785.000**
26	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	5 Dokumen	25.100.000	APBD		5 Dokumen	28.865.000
27	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	135 Dokumen	21.350.000	APBD		148 Dokumen	24.552.500
28	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	9 Dokumen	139.450.000	APBD		9 Dokumen	160.367.500
	Mutasi dan Promosi ASN		**Jumlah Mutasi dan Promosi yang di Proses**	**BKPSDM**	**528 Orang**	**395.448.000**	**APBD**		**510 Orang**	**454.765.200**
29	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	5 Dokumen	306.777.000	APBD		10 Orang	352.793.550
30	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	20 Dokumen	65.087.000	APBD		500 Orang	74.850.050
31	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	500 Dokumen	23.584.000	APBD		500 Dokumen	27.121.600
	Pengembangan Kompetensi ASN		**Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur**	**BKPSDM**	**281 Orang**	**1.477.089.600**	**APBD**		**295 Orang**	**1.698.653.040**
32	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	BKPSDM	42 Orang	607.361.600	APBD		25 Berkas	698.465.840

33	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	2 Dokumen	170.142.000	APBD		2 Dokumen	195.663.300
34	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	200 Orang	217.865.000	APBD		20 Orang	250.544.750
35	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	105 Orang	434.531.000	APBD		150 Orang	499.710.650
36	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKPSDM	75 Orang	47.190.000	APBD		75 Orang	54.268.500
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian dan Evaluasi Kinerja**	**BKPSDM**	**325 Orang**	**75.193.000**	**APBD**		**4000 Orang**	**86.471.950**
37	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	1 Orang	27.620.000	APBD		1 Orang	31.763.000
38	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	BKPSDM	10 Dokumen	30.890.000	APBD		100 Berkas	35.523.500
39	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	250 Orang	16.683.000	APBD		250 Berkas	19.185.450

BAB V
PENUTUP

Pencapaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam era yang semakin rumit dan kompleks ditengah perubahan yang semakin dinamis menuntut Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mempersiapkan diri secara terus menerus kearah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi daerah. Pembangunan dan pengembangan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu pada rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.